

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan pandangan di antara individu dan kelompok adalah hal yang umum. Namun, dari perbedaan pandangan ini, belum tentu terjadi konflik. Konflik muncul saat individu atau kelompok memiliki keinginan yang bertentangan. Persaingan akan terjadi ketika ada upaya bersaing antara individu atau kelompok yang ingin memperoleh hal yang sama, namun hanya satu yang akan berhasil mendapatkannya. (Saputra, 2020)

Pada era perkembangan teknologi informasi yang pesat, penggunaan inovasi dalam berbagai sektor kehidupan telah menjadi suatu keharusan. Salah satu bentuk inovasi yang diterapkan dalam konteks transportasi adalah sistem parkir elektronik atau e-parkir. E-parkir merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola dan mengontrol parkir kendaraan secara lebih efisien. Di tengah-tengah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi dalam pengelolaan parkir, penerapan e-parkir tidak selalu berjalan mulus. Konflik dan resistensi dari berbagai pihak seringkali muncul dalam tahap uji coba implementasi e-parkir. Salah satu contoh nyata konflik tersebut dapat ditemukan dalam kasus uji coba e-parkir di Kota Ponorogo. (Ronan Adi Permana, Dida Rahmadanik, 2023)

Ponorogo, sebagai salah satu kota yang berkembang di Indonesia, mengalami dinamika yang kompleks dalam menerapkan e-parkir. Uji coba e-parkir di Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, petugas parkir, dan pihak-pihak lainnya. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mendalami konflik yang terjadi selama uji coba e-parkir di Ponorogo. Analisis mendalam terhadap perbedaan pandangan, kepentingan, yang muncul dari berbagai pihak terlibat akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika konflik yang berkembang. Sebagai kontribusi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan solusi konstruktif untuk menangani konflik serupa di masa depan.

Dalam rangka pemanfaatan kemajuan teknologi untuk pengembangan inovasi, Dinas Perhubungan Bidang Sarana dan Prasarana Seksi Perparkiran melakukan penerapan sistem baru yaitu e-parkir dengan berkolaborasi bersama tim dari Universitas Muhammadiyah Kab. Ponorogo untuk mewujudkan sistem ini. Dengan adanya e-Parkir, proses pencetakan karcis, pemantauan turn over kendaraan, jumlah kendaraan dalam 1 hari di satu lokasi parkir, semuanya dapat di ketahui secara real time dari dalam dashboard aplikasi sehingga hal ini akan sangat berguna untuk Dinas Perhubungan dalam melakukan monitoring dan evaluasi. (Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, 2023)

Meskipun belum ada aturan teknis yang merinci e-parkir, Kabupaten Ponorogo menggunakan payung hukum Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan terkait e-parkir ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut. Uji coba e-parkir menjadi bagian dari kebijakan daerah yang melibatkan Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Ponorogo, dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo, guna mengatasi masalah transparansi pembayaran biaya parkir dan meningkatkan tingkat kedisiplinan dalam penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di tingkat daerah. (Perda Kab Ponorogo No.1, 2020)

Referensi sebagai acuan adalah langkah awal yang penting. Setelah meninjau literature yang ada, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan fokus penelitian ini. Penelitian sebelumnya pertama yang dilakukan oleh Aulia Billqis & Retno Suryawati dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, membahas mengenai implementasi program e-parkir di Kota Surakarta. Mereka mencatat bahwa sistem e-parkir di kota tersebut awalnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan sistem tapping menggunakan kartu brizzi dari Bank BRI. Pengguna kemudian

mendapatkan struk karcis yang harus diserahkan kepada juru parkir untuk menentukan biaya parkir berdasarkan waktu masuk kendaraan. Namun, seiring berjalannya waktu, pihak Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengalami kendala dalam pelaksanaan e-parkir, termasuk terbatasnya pembayaran hanya menggunakan kartu brizzi, kerusakan mesin e-parkir yang mengakibatkan pindahnya ke metode manual, dan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan mesin e-parkir. Upaya perbaikan dilakukan dengan kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan PT Telkom pada tahun 2019 untuk memperbarui sistem pembayaran dengan berbagai e-wallet dan QRIS.

Penelitian sebelumnya dengan judul "Implementasi Kebijakan E-parking Dalam Rangka Penertiban Juru Parkir dan Pungutan Liar di Kota Palembang" oleh Muhammad Alrafi Ramdani dari Program Studi tertentu, membahas implementasi e-parkir di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-parking untuk menertibkan juru parkir dan mengurangi pungutan liar di Kota Palembang masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat dan juru parkir. Selain itu, mayoritas juru parkir juga belum mampu menggunakan sistem e-parking dengan baik. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan ini juga belum optimal karena kurangnya partisipasi aktif dari lingkungan internal dan eksternal. Terakhir, tidak adanya kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan juga menjadi masalah dalam proses implementasi.

Penelitian terdahulu ketiga jurnal yang berjudul ""Kebijakan parkir elektronik sebagai salah satu wujud penerapan Smart City di Kota Surabaya." Oleh Galih Wahyu Pradana , Deby Febriyan Eprilianto , dan Mochamad Rendy Ramadhana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. kebijakan parkir elektronik di Taman Bungkul Kota Surabaya berjalan dengan baik. Hal ini, ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan ketiadaan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun beberapa

masalah yang terjadi pada penerapan kebijakan parkir elektronik yaitu kepatuhan juru parkir dalam menjalankan kebijakan parkir elektronik yang masih kurang. Masih terdapat kecurangan yang dilakukan oleh para juru parkir. Adapun kecurangan yang dilakukan oleh juru parkir adalah dengan menarik tarif karcis parkir yang melebihi ketentuan. Kecurangan ini terjadi karena dukungan dari sebagian masyarakat yang membiarkan serta memberikan kelebihan tarif parkir kepada juru parkir dengan alasan adanya rasa simpati kepada juru parkir.

Dari hasil analisis konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan petugas parkir dalam implementasi e-parkir, dapat ditemukan beberapa gap atau perbedaan dengan tiga penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang membahas implementasi e-parkir di Kota Surakarta menyoroti kendala teknologi, seperti pembayaran terbatas menggunakan kartu brizzi dan kerusakan mesin e-parkir. Sementara konflik yang muncul dalam penelitian tersebut lebih terfokus pada resistensi masyarakat terhadap metode tapping dan penggunaan kartu. Penelitian kedua yang mengamati kebijakan e-parking di Kota Palembang menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada kurangnya keterampilan teknologi dari pihak juru parkir, sedangkan konflik di penelitian tersebut lebih difokuskan pada dimensi tepat kebijakan dan pelaksana yang belum optimal. Penelitian ketiga, yang membahas kebijakan parkir elektronik di Taman Bungkul Kota Surabaya, menyoroti kepatuhan juru parkir terhadap kebijakan, dengan masalah utama terkait kecurangan dalam tarif parkir. Dalam konteks konflik kepentingan, penelitian terbaru lebih menekankan aspek keuangan dan potensi manipulasi pendapatan retribusi parkir oleh petugas parkir. Sebaliknya, tiga penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada hambatan teknologi, resistensi masyarakat, dan kurangnya keterampilan teknologi dari pihak juru parkir.

Untuk mengatasi konflik diatas, penelitian ini akan menggali lebih dalam melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, analisis kebijakan, dari penerapan e-parkir. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang penyebab

konflik dan mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan untuk mencapai keseimbangan antara penerapan teknologi dan kebutuhan lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari masalah yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang diambil adalah :

“Bagaimana analisis konflik kepentingan dalam penerapan e-parkir di Kabupaten Ponorogo?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk Menjelaskan Bagaimana Analisis Konflik Kepentingan Dalam Penerapan E-parkir di Kabupaten Ponorogo?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian secara teoritis memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang konflik kepentingan dan penerapan e-parkir. Penulis dapat menyumbangkan gagasan-gagasan baru atau memperbarui pemahaman yang ada tentang topik tersebut melalui analisis literatur yang komprehensif.

2. Secara Praktis

Penelitian praktis dapat memberikan wawasan tentang solusi yang berkelanjutan dalam mengelola konflik kepentingan dalam penerapan e-parkir. Dengan mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi konflik kepentingan, penulis dapat merekomendasikan strategi dan tindakan yang dapat mengurangi atau mengatasi konflik kepentingan yang mungkin muncul.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulis akan mengembangkan keterampilan penelitian yang sangat berharga melalui penyusunan skripsi ini. Juga akan mempelajari

metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta cara menyusun dan mengorganisir informasi secara efektif.

4. Manfaat Bagi Pemerintahan

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait penerapan e-parkir. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konflik kepentingan, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan yang ada dan merancang strategi yang lebih baik untuk mengatasi konflik tersebut. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang peraturan yang lebih baik dan solutif.

E. Penegasan Istilah

1. Konflik Kepentingan

Menurut Robbins (1996) dalam bukunya "Organizational Behavior," konflik adalah hasil dari interaksi antara dua pandangan yang tidak sejalan, yang mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dengan beragam dampak, baik positif maupun negatif. Luthans (1981) juga mendefinisikan konflik sebagai situasi yang timbul dari keinginan manusia yang saling bertentangan. Meskipun sering kali dikaitkan dengan perbedaan pendapat, persaingan, atau bahkan permusuhan, konflik sebenarnya muncul karena adanya keinginan yang berbeda di antara individu atau kelompok. Oleh karena itu, tidak semua perbedaan pendapat dapat dianggap sebagai konflik, karena konflik lebih merupakan hasil dari ketidaksepakatan yang muncul dari keinginan yang berbeda. (Yani & Simamora, 2022)

Konflik kepentingan merujuk pada situasi ketika seseorang yang berada dalam posisi yang memerlukan kepercayaan, seperti pengacara, politikus, eksekutif perusahaan, atau direktur, memiliki kepentingan yang berhubungan dengan tugas profesional dan kepentingan pribadi. Ketika kedua kepentingan ini saling berhubungan, dapat menyulitkan individu tersebut dalam menjalankan tugasnya. Konflik kepentingan bisa terjadi meskipun tidak selalu mengakibatkan tindakan yang tidak etis atau tidak

pantas. Konflik kepentingan dapat menyebabkan pertentangan antara loyalitas pada tugas profesional dengan kepentingan lain, yang pada akhirnya dapat mengurangi kredibilitas moral seseorang. Konflik ini muncul karena adanya tarikan antara kesetiaan pada nilai-nilai tertentu dan tanggung jawab yang bersifat lebih umum. (Yani & Simamora, 2022)

2. E-parkir

E-Parkir merujuk pada sistem parkir elektronik yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau, mengatur, dan memungut biaya parkir. Sistem e-parkir ini dapat mencakup penggunaan perangkat keras seperti sensor parkir, terminal pembayaran elektronik, dan perangkat lunak yang memungkinkan pengelolaan dan pemantauan parkir secara efisien. (Martadipura, 2013)

E-Parkir adalah layanan parkir yang bertujuan menciptakan lingkungan parkir yang aman, nyaman, dan transparan. Harapannya, sistem ini dapat mengatur tarif secara bertahap untuk mengurangi konflik antara petugas parkir dan masyarakat. E-Parkir diharapkan dapat mengurangi praktik parkir ilegal dan meminimalisir kebocoran pendapatan dari retribusi parkir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Evaluasi efektivitas E-Parkir dilakukan dengan mempertimbangkan teori Budiani, yang mencakup ketepatan sasaran program, proses sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pengawasan program. (Dewi Pradita & Utomo, 2021)

F. Teori Konflik

Teori yang diajukan oleh Lewis A. Coser lebih menekankan pada proses-proses sosial yang berdasarkan pada kesepakatan atau nilai normatif, harmoni, dan ketertiban. Menurut pandangan teori Lewis A. Coser, masyarakat idealnya berada dalam keadaan yang damai, tenteram, aman, dan bersatu tanpa adanya konflik. Konflik dipandang sebagai masalah besar yang bisa mengganggu, mengacaukan, atau menyebabkan

ketidakseimbangan sistem secara keseluruhan dan menyeluruh. Bahkan Lewis A. Coser mengkritik dan menolak pandangan sosiolog Amerika Serikat yang memiliki persepsi buruk terhadap fungsi dan konsep konflik sosial. Karena menurutnya, adanya konflik tidaklah semata-mata hanya akan berakhir pada kerusakan, disintegrasi, berkonotasi disfungsional di mana sistem konflik tersebut berlangsung, namun di sisi lain dari adanya konflik tersebut ada konsekuensi/konsekuensi/dampak yang positif yang berpotensi menguntungkan sistem tersebut. (Rofiah, 2017)

Teori yang diusung Lewis A. Coser ini pertama kali diperkenalkan sekitar Tahun 1956 melalui buah karyanya yang diangkat dari tugas akhir disertasinya yang bertajuk *The Function of Sosial Conflict*. Teori ini bersifat naturalis dan termasuk dalam kategori teori konflik modern. Pandangan Lewis A. Coser lebih menitikberatkan pada peran konflik itu sendiri yang dapat menghasilkan penyesuaian sosial yang lebih baik daripada hanya memperhatikan aspek disfungsional, peperangan, atau kegaduhan seperti yang ditekankan oleh teori struktural lainnya. Secara umum, teori-teori tersebut melihat konflik sebagai fenomena yang berdampak pada pertentangan dan tindakan kekerasan. Coser menganggap konflik sebagai sebuah perjuangan terkait nilai-nilai yang melibatkan perolehan status kekuasaan dan upaya untuk menetralkan sumber-sumber yang dapat melukai pihak yang bersaing. Ia kembali mengungkapkan dalam merangkum seluruh fenomena sebagaimana di atas tidak ada teori konflik sosial yang mampu merangkumnya. Analisa Lewis A. Coser tentang fungsi dari konflik sosial juga bisa dipandang sebagai suatu jalan pintas ataupun solusi terhadap perspektif-perspektif teori konflik yang sifatnya radikal yang diusung dalam pandangan Marxis. (Azisi, 2021)

Teori mengenai fungsi konflik sosial diperkenalkan pada tahun 1956 oleh Lewis Coser melalui karyanya yang berjudul "*The Functions of Social Conflict*", yang juga merupakan bagian dari disertasinya. Teori konflik Coser dianggap sebagai teori konflik modern yang memiliki karakter naturalis. Dia lebih memusatkan perhatiannya pada peran konflik dalam membawa penyesuaian sosial yang lebih baik, daripada hanya

memfokuskan pada aspek disfungsional dari konflik seperti teori struktural-fungsional sebelumnya. Coser melihat konflik sebagai pertarungan terkait nilai-nilai, tuntutan atas status yang terbatas, kekuasaan, dan sumber-sumber yang mengurangi dampak dari upaya lawan untuk menyakiti atau menghilangkan mereka. Lewis A. Coser menyatakan bahwa tidak ada teori konflik sosial yang dapat mencakup semua fenomena konflik tersebut. Oleh karena itu, ia tidak bermaksud untuk menciptakan teori yang bersifat umum, tetapi lebih untuk menjelaskan konsep bahwa konflik sosial bisa memiliki peran positif bagi sebuah kelompok atau masyarakat daripada hanya merusak solidaritas, terutama jika isu-isu konflik diakui dan ditangani secara terbuka alih-alih ditekan. (Rofiah, 2017)

Tidak bisa disangkal bahwa konflik merupakan sebuah realitas yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Namun, konflik yang terjadi di dalam masyarakat tidak selalu menjadi isu yang tidak bisa diselesaikan. Coser menegaskan bahwa konflik tidak selalu memiliki konotasi negatif. Sebaliknya, konflik dapat memiliki dampak positif dalam konteks sosial masyarakat dengan memungkinkan rekonsiliasi antara kelompok-kelompok yang tengah terlibat dalam konflik. Melalui konflik, individu-individu atau kelompok dalam suatu komunitas berusaha untuk membentuk dialog demi memelihara kesatuan dan integritas sebagai bagian dari komunitas yang khusus, terutama dengan kelompok-kelompok dari latar budaya yang berbeda. Lebih dari itu, konflik mampu menjadi pemicu bagi setiap kelompok untuk mengubah pandangan pesimistisnya menjadi optimis, dengan tujuan untuk bersatu dengan kelompok-kelompok lainnya. (Rofiah, 2017)

Konflik yang melibatkan partisipasi individu sebagai perwakilan kolektivitas atau kelompok, yang bertarung bukan untuk kepentingan pribadi mereka tetapi semata-mata demi tujuan kolektif yang mereka wakili, cenderung memiliki sifat lebih ekstrem dan tanpa kompromi dibandingkan dengan mereka yang terlibat dalam konflik atas dasar motivasi pribadi. Penghilangan elemen personalitas dari konflik cenderung memperdalam pertentangan karena tidak adanya faktor-faktor personal yang biasanya bisa

memodifikasi atau mengubah arah konflik. Konflik antarkelompok ini bisa dikendalikan ketika seluruh kelompok dihadapkan pada tujuan bersama yang lebih tinggi (superordinate goals), di mana mencapainya tidak mungkin tanpa partisipasi dari seluruh kelompok. Inilah titik di mana konflik berubah menjadi hubungan antarkelompok yang harmonis. Menurut teori konflik, penyelesaian konflik antarkelompok berada pada tahap akhir, yaitu bagaimana merubah pertentangan atau perselisihan menjadi bentuk kerja sama. Konflik antarkelompok dapat bertransformasi menjadi kerjasama apabila diperkenalkan superordinate goals (tujuan penting yang dicapai melalui kooperasi) yang meyakinkan kepada semua pihak, menunjukkan bahwa di atas perselisihan yang ada, ada tujuan yang jauh lebih besar yang harus dikejar bersama. (Rofiah, 2017)

Teori ini memberikan wawasan yang sangat berguna dalam memahami perbedaan kepentingan yang dapat menyebabkan konflik antara berbagai pihak yang terlibat dalam penggunaan e-parkir. Berikut adalah beberapa indikator teori konflik kepentingan menurut Coser:

1) Ketidaksetaraan Kekuasaan

Konflik kepentingan sering terjadi ketika ada ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan antara individu atau kelompok. Kelompok yang memiliki kekuasaan lebih cenderung melindungi kepentingan mereka, sementara kelompok yang kurang berkuasa bisa merasa diperlakukan tidak adil.

2) Perbedaan Nilai dan Norma

Konflik kepentingan juga dapat timbul karena perbedaan dalam nilai, norma, atau keyakinan antara individu atau kelompok. Ketidaksepakatan dalam hal ini dapat memicu konflik.

3) Interdependensi

Konflik kepentingan sering muncul ketika ada tingkat interdependensi antara individu atau kelompok. Artinya, tindakan satu pihak dapat mempengaruhi pihak lain, dan jika kepentingan mereka bertentangan, konflik bisa terjadi.

4) **Ketegangan dan Stres**

Adanya ketegangan dan stres dalam hubungan sosial juga dapat menjadi indikator konflik kepentingan. Ketika individu atau kelompok merasa tertekan atau cemas akibat konflik kepentingan, itu dapat menjadi tanda adanya konflik. (Peters, n.d.)

G. **Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penjabaran yang lebih spesifik mengenai cara pengukuran, observasi, atau penentuan secara konkret terhadap variabel-variabel yang terlibat dalam sebuah penelitian. Definisi operasional membantu mengubah konsep teoritis menjadi langkah-langkah yang dapat diobservasi dan diukur secara empiris. Definisi operasional yang digunakan dalam skripsi ini disesuaikan dengan kondisi lapangan yang spesifik. Definisi operasional dalam skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut :

1. **Ketidaksetaraan Kekuasaan**

Tingkat ketidaksetaraan kekuasaan dalam situasi e-parkir dapat diukur dengan melihat seberapa besar wewenang Dinas Perhubungan dalam membuat keputusan terkait sistem parkir, dan sejauh mana pihak lain terlibat dalam proses mengambil keputusan.

2. **Perbedaan Nilai dan Norma**

Perbedaan dalam nilai dan norma selama penerapan e-parkir dapat diamati melalui respons konflik antara keinginan petugas parkir terhadap e-parkir, dan keinginan pihak lain seperti Dinas Perhubungan.

3. **Interdependensi**

Indikator interdependensi dalam konteks penelitian ini dapat didefinisikan sebagai tingkat ketergantungan saling antara implementasi sistem e-parkir dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas parkir.

4. **Ketegangan dan Stress**

Ketegangan dan stres atau tekanan pada petugas parkir dapat diketahui dengan melihat bagaimana mereka merespons perubahan, khususnya

dalam penggunaan e-parkir. Tanda-tanda tekanan dapat terlihat dari kesulitan dalam beradaptasi sesuatu yang baru

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian Kualitatif. Di dalamnya, data diperoleh melalui proses wawancara dengan informan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah suatu pendekatan dalam penelitian di mana peneliti secara sengaja memilih partisipan atau unit analisis yang dianggap memiliki informasi yang paling relevan atau mendalam terkait dengan tujuan penelitian yakni mengeksplorasi isu-isu yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta melalui pengumpulan dokumen dari berbagai narasumber.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, dipilihnya tempat ini karena bersamaan dengan adanya uji coba e-parkir di jalan HOS Cokroaminoto Ponorogo, dengan melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam uji coba e-parkir. Adapun pihak yang akan menjadi subjek penelitian melibatkan Dinas Perhubungan, petugas parkir, dan Ketua Paguyuban Parkir Ponorogo.

3. Subjek/pemilihan Informan

Subjek dalam penelitian ini adalah DISHUB (Dinas Perhubungan) Kabupaten Ponorogo. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive*. Teknik *purposive* dilakukan dengan berdasarkan tujuan dari penelitian itu sendiri. *Purposive* itu sendiri adalah teknik pengambilan informan dengan sengaja yang dinilai mampu menyampaikan informasi dan data yang *real* data yang sebenar-benarnya. Dalam penelitian ini informan yang dipilih:

- 1) Kepala bidang Lalu Lintas, Sarana dan Prasarana : Bapak Setyo Budiyo, Sos., M.M.
- 2) Petugas Parkir : Bapak Amad(ketua paguyuban parkir Ponorogo), dan Bapak Agus

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan terhadap objek yang dituju dengan pencatatan mengenai keadaan atau perilaku yang diamati. Teknik observasi melibatkan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang sedang diselidiki. Secara umum, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan langsung, tetapi juga dapat dilakukan secara tidak langsung. (Izzaty, Astuti, & Cholimah, 1967)

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk interaksi antara dua individu di mana salah satu pihak bertujuan untuk mendapatkan informasi dari pihak lain dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. (Sugiyono, 2018)

3) Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan dokumen dan data yang relevan terkait dengan topik penelitian, yang kemudian dianalisis untuk memverifikasi dan membuktikan suatu kejadian atau situasi yang diteliti. Validitas hasil observasi atau wawancara dapat ditingkatkan jika didukung oleh dokumen yang terkait dengan area fokus penelitian tersebut. (Sandewi, 2017)

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam karya Sugiyono (2008: 237), mereka menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif, aktivitas harus berlangsung terus-menerus sampai selesai sehingga data yang diperoleh telah mencapai tingkat kejenuhan. Tingkat kejenuhan data ditunjukkan

ketika tidak ada lagi informasi atau data baru yang dapat diperoleh. Kegiatan dalam analisis data melibatkan beberapa tahapan, seperti mereduksi data (data reduction), menyajikan data (data display), serta melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). (ESTHI, 2019)

Analisis data adalah langkah sistematis dalam menyusun dan mengolah informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta sumber data lainnya. Proses analisis ini melibatkan pengorganisasian data, penguraian ke dalam unit-unit terpisah, sintesis informasi, identifikasi pola atau tren, seleksi elemen penting yang akan diteliti, dan pembuatan kesimpulan dari informasi yang telah diolah. (ESTHI, 2019)

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum, selama, dan setelah kegiatan pengumpulan data. Menurut Nasution yang dikutip dalam Sugiyono (2008: 236), proses analisis data dimulai dari tahap merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum melakukan penelitian lapangan, dan berlanjut terus hingga tahap penulisan hasil penelitian. (ESTHI, 2019)

Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap. Proses analisis data dijelaskan di bawah ini:

1) **Penyajian Data**

Penyajian data bertujuan untuk mengatur data yang telah disederhanakan sehingga tersusun dalam pola hubungan yang lebih jelas, memudahkan pemahaman, dan memungkinkan perencanaan langkah-langkah penelitian berikutnya. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengorganisir data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki signifikansi. Proses ini melibatkan pengaturan data, pembentukan koneksi antara fenomena yang ada untuk memahami esensi dari peristiwa yang sebenarnya terjadi, serta mengevaluasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan penelitian. (Iii, 2020)

2) **Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses analisis yang menyempitkan, mengelompokkan, mengarahkan, serta mengatur data dengan menghilangkan informasi yang tidak relevan, sehingga memungkinkan penyusunan simpulan akhir yang dapat diambil dan diverifikasi. (ESTHI, 2019)

3) **Penarikan Kesimpulan**

Selama tahap penelitian, kesimpulan diambil secara bertahap seiring dengan proses reduksi data. Ketika data yang terkumpul sudah memadai, kesimpulan sementara dihasilkan, dan pada saat data telah lengkap, kesimpulan akhir diperoleh. (Bloom & Reenen, 2013)

6. **Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data. Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada, triangulasi data dapat melibatkan kombinasi beberapa teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. (Kojongian, Tumbuan, & Ogi, 2022)